

Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah Cinunuk Kabupaten Bandung

¹ Kholishotul Amaliyah,² Mulyawan Safwandy Nugraha'

¹² UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Received: 20-08-2024

Revised: 11-11-2024

Accepted: 18-12-2024

Abstrak

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat, dan manajemen keuangan memegang posisi sentral dalam meningkatkan mutu pendidikan. Artikel ilmiah ini menyelidiki kebijakan dan implementasi manajemen keuangan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah di Cinunuk, Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, memanfaatkan wawancara dan tinjauan pustaka untuk memahami langkah-langkah strategis yang diambil oleh lembaga tersebut. Dalam konteks latar belakang penelitian, dibahas pentingnya kebijakan pembiayaan berkelanjutan sebagai landasan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menyelidiki implementasi kebijakan-kebijakan ini, mengidentifikasi hambatan, dan mengevaluasi dampaknya terhadap mutu pendidikan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah. Temuan penelitian menyoroti hubungan erat antara keberhasilan implementasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, transparansi keuangan, dan adaptasi strategis terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kebijakan dan implementasi manajemen keuangan untuk meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kesimpulan dari artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman praktis dan teoritis dalam pengembangan kebijakan pembiayaan pendidikan yang difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan menengah seperti MTs Sains Qurani Azzakiyyah.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembiayaan, Kualitas Pendidikan.

Abstract

Education plays a crucial role in societal development, and financial management holds a central position in enhancing educational quality. This scholarly article investigates the policies and implementation of financial management at MTs Sains Qurani Azzakiyyah in Cinunuk, Bandung Regency, with the aim of improving educational quality. The research method employed a qualitative approach, utilizing interviews and literature reviews to understand the strategic steps taken by the institution. In the context of the research background, the importance of sustainable financing policies as a foundation for improving educational quality is discussed. The study delves into the implementation of these policies, identifies obstacles, and evaluates their impact on the educational quality at MTs Sains Qurani Azzakiyyah. The research findings highlight a close relationship between successful implementation and the involvement of various stakeholders, financial transparency, and strategic adaptation to environmental changes. Additionally, the study provides practical recommendations to enhance financial management policies and implementation for increased effectiveness in improving educational quality. The conclusion of this article is expected to contribute significantly to practical and theoretical understanding in the development of educational financing policies focused on enhancing educational quality, especially in secondary education institutions such as MTs Sains Qurani Azzakiyyah.

Keywords: Policy, Financing, Educational Quality.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat yang esensial bagi setiap individu, dimanapun dan kapanpun berada. Sebagai faktor kunci dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, pendidikan dijamin dalam UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Namun, realitasnya, tidak semua individu dapat mengakses pendidikan dengan layak dikarenakan berbagai faktor, termasuk biaya pendidikan yang tinggi. Pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam upaya meningkatkan kualitas manusia di Indonesia, pemerintah tidak bisa beroperasi sendiri. Kebijakan dan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melibatkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat. Hubungan ini dianggap tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu Pendidikan (Nanang Fattah, 2000). Masalah pembiayaan menjadi kompleks dalam pengelolaan pendidikan. Faktor ini tidak hanya berdampak pada tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran, tetapi juga terkait erat dengan aspek keuangan. Pembiayaan menjadi isu sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan lembaga pendidikan untuk menyediakan biaya dapat menghambat proses belajar mengajar dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Keuangan dan pembiayaan merupakan sumber daya langsung yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini semakin diperkuat dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di mana sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta pertanggungjawabkan pengelolaan dan sumber daya secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keterbatasan dana seringkali menjadi kendala utama dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kemampuan sekolah dalam mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai kebutuhan menjadi kunci dalam keberhasilan MBS (E Mulyasa, 2005). Walaupun masalah keuangan tidak sepenuhnya berdampak langsung pada kualitas sekolah, terutama terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran, reformasi pendidikan yang murah dan berkualitas tetap memerlukan pendanaan yang mencukupi. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada daerah dan sekolah, masalah keuangan menjadi kewenangan langsung sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah memiliki tanggung jawab langsung terhadap keuangan sekolah dan diperlukan upaya untuk meningkatkan keuangan tersebut. Kemampuan mengelola keuangan sekolah menjadi kunci dalam menjadi kepala sekolah yang profesional (E Mulyasa, 2003). Implementasi kebijakan manajemen pembiayaan yang optimal di sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan berkualitas merupakan pilar penting pembangunan suatu bangsa melalui pengembangan potensi individu. Masa depan suatu bangsa sangat tergantung pada mutu dan kualitas pendidikan yang dijalankan. Untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan, perhatian serius diperlukan dari penyelenggara pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam sistem pendidikan nasional saat ini, fokus pada mutu dan kualitas bukan hanya tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tetapi juga melibatkan sinergi antara berbagai komponen termasuk masyarakat. Untuk melaksanakan penjaminan mutu tersebut, diperlukan kegiatan yang sistematis dan terencana dalam bentuk manajemen mutu.

Manajemen mutu dalam pendidikan merupakan suatu cara untuk mengatur seluruh sumber daya pendidikan, dengan tujuan agar semua individu yang terlibat di dalamnya dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan, sehingga menghasilkan layanan pendidikan yang tidak hanya sesuai tetapi juga melebihi harapan "pelanggan pendidikan". Sejalan dengan paradigma kebijakan pemerintah yang mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan tersebut membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat.

Dalam menghadapi persaingan global, bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi keniscayaan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, efisien, dan produktif dalam proses pembangunan. Urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia mendorong pemerintah bersama swasta untuk berupaya mewujudkannya melalui pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas. Peningkatan kualitas menjadi prasyarat utama untuk menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan sehat dan berkualitas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak dapat lepas dari persaingan global tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas menjadi agenda utama dalam meningkatkan mutu sekolah agar dapat bertahan dalam era global. Konsep Total Quality Management (TQM) atau Manajemen Mutu Terpadu menjadi landasan untuk peningkatan mutu secara menyeluruh di bidang manajemen. Faktor-faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan, seperti kurang optimalnya manajemen sekolah, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran, serta kekurangan SDM tenaga pendidik, menjadi fokus perbaikan. Asumsi bahwa "mainstreamnya" perbaikan mutu terletak pada aspek manajemen sekolah dianggap sebagai hipotesis dasar. Dengan perbaikan manajemen, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

METODE

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Creswell (2016) Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk menggali dan menginterpretasikan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait dengan permasalahan sosial atau masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif ini dipilih karena dianggap sesuai dengan permasalahan yang ada dan relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan dengan mendalam efektivitas pengawasan keuangan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh MTs Sains Qurani Azzakiyyah Cinunuk Kabupaten Bandung.

Pendekatan ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur kepada Kepala Madrasah, Bendahara dan komite madrasah atau pengawas, Dewan Guru dan atau Staff Administrasi di MTs Sains Qurani Azzakiyyah Cinunuk Kabupaten Bandung.

Data observasi diperoleh melalui kunjungan langsung ke MTs Sains Qurani Azzakiyyah Cinunuk Kabupaten Bandung. Sementara itu, studi dokumentasi melibatkan analisis dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait serta dokumen pendukung lainnya. Studi literatur melibatkan telaah terhadap referensi dari buku, jurnal, dan berita di media elektronik. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode yang dijelaskan oleh Creswell yaitu Langkah-langkahnya melibatkan pengolahan dan persiapan data, penilaian keseluruhan data, analisis detail dengan melakukan coding pada semua data, pembuatan kode untuk menggambarkan setting yang dianalisis, penyusunan deskripsi dan tema dalam laporan naratif atau kualitatif, dan pengolahan atau interpretasi data. Validitas data diuji melalui triangulasi data. Penelitian ini dilakukan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah Cinunuk Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis mendalam tentang Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah Cinunuk Kabupaten Bandung peneliti mengadopsi kebijakan pembiayaan, implementasi kebijakan dan tantangan khusus yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembiayaan.

Berikut adalah hasil wawancara kepada Informan, terkait dengan kebijakan dan implementasi manajemen pembiayaan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah Cinunuk Kabupaten Bandung, di mana peneliti mengadopsi kebijakan pembiayaan: Pertanyaan: Apakah penelitian ini mengadopsi kebijakan pembiayaan tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah? Jawaban

Kepala Madrasah: *"Ya, dalam penelitian ini, kami mengadopsi kebijakan pembiayaan yang berfokus pada peningkatan efisiensi penggunaan dana pendidikan. Kami menetapkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi anggaran, memprioritaskan kebutuhan pendidikan, dan mengoptimalkan alokasi dana untuk berbagai keperluan."* Pertanyaan: Bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan ini dilakukan oleh sekolah? Jawaban Bendahara: *"Implementasi dimulai dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan sekolah. Setelah itu, kami menyusun kebijakan pembiayaan yang melibatkan seluruh staf dan pihak terkait. Kami menerapkan sistem pelaporan berkala untuk memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa setiap rupiah diarahkan pada upaya meningkatkan mutu pendidikan."* Pertanyaan: Bagaimana respons atau partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pembiayaan yang diadopsi oleh MTs Sains Qurani Azzakiyyah? Jawaban Wakamad: *"Masyarakat memberikan respons positif terhadap kebijakan pembiayaan yang kami adopsi. Mereka merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan melihat dampak positif dari peningkatan mutu pendidikan. Beberapa bahkan berkontribusi dalam penggalangan dana untuk proyek tertentu."* Pertanyaan: Apakah penelitian ini menemui tantangan khusus dalam mengadopsi kebijakan pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan? Jawaban Guru: *"Tantangan utama adalah mengubah mindset dan kebiasaan lama terkait pengelolaan dana. Proses transisi memerlukan waktu dan upaya edukasi intensif agar semua pihak terlibat sepenuhnya. Namun, hasilnya sejauh ini menunjukkan perkembangan positif dalam peningkatan mutu Pendidikan."*

Berdasarkan hasil wawancara terkait kebijakan dan implementasi manajemen pembiayaan di MTs Sains Qurani Azzakiyyah Cinunuk Kabupaten Bandung, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pembiayaan yang diadopsi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Efektivitas kebijakan tersebut terlihat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penggalangan dana tambahan menunjukkan kesadaran tinggi akan peran bersama dalam mendukung pendidikan. Meskipun terdapat tantangan, seperti perubahan mindset dan kebiasaan lama terkait pengelolaan dana, namun upaya edukasi dan sosialisasi berhasil menciptakan perubahan positif secara bertahap. Hasil penelitian juga mencerminkan bahwa adopsi kebijakan pembiayaan telah berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik di MTs Sains Qurani Azzakiyyah. Rekomendasi untuk penelajutan studi melibatkan pemantauan jangka panjang terhadap dampak kebijakan, serta penyesuaian yang mungkin diperlukan seiring perkembangan dan perubahan kebutuhan pendidikan. Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan pembiayaan ini menjadi landasan penting bagi peningkatan mutu pendidikan di institusi tersebut.

Berbicara mengenai Kebijakan Publik, atau *Public Policy* dalam bahasa Inggris, merujuk pada keputusan-keputusan yang mengikat bagi masyarakat pada tingkat strategis dan bersifat garis besar, yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Rian Nugroho, 2008). Pembiayaan pendidikan, secara sederhana, adalah biaya yang harus tersedia dan diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan guna mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan tersebut melibatkan pengadaan gedung, infrastruktur, peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan, dan sebagainya (Abuddin Nata, 2010). Pembicaraan mengenai pembiayaan pendidikan muncul seiring pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang awalnya dilakukan secara individual dan sambilan dalam situasi ilmu pengetahuan yang belum berkembang, menuju kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi di mana ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Dalam situasi terakhir ini, pembiayaan pendidikan menjadi hal yang harus diadakan secara khusus, melibatkan tempat, sarana prasarana, infrastruktur, guru, dan elemen lainnya yang diselenggarakan secara khusus untuk kegiatan belajar mengajar.

Pada masa klasik di dunia Islam, terutama pada abad ke-7 hingga ke-13 M, telah terjadi kesadaran akan pentingnya pengeluaran biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan. Namun, motif dan tujuannya berbeda dengan negara-negara maju seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di zaman kejayaan Islam, pengeluaran biaya pendidikan yang besar dilakukan bukan untuk mencari keuntungan material atau komersial, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia dengan memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradabannya. Secara umum, istilah keuangan atau pembiayaan, yang berasal dari kata "finance," mengacu pada usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk

membayai aktivitas yang akan dilakukan. Namun, definisi keuangan atau pembiayaan telah diperluas untuk mencakup penggunaan modal tersebut. Dalam konteks pendidikan, pembiayaan mencakup biaya investasi (sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan modal kerja tetap), biaya operasional (biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik), dan biaya personal (gaji pendidik, tenaga kependidikan, dan tunjangan terkait). Sekolah diharapkan memiliki dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan, menggunakan dana yang tersedia dengan efisien untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Penghimpunan dana sekolah dilakukan dengan memperhatikan potensi sumber dana, seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat, hibah, dan sumbangan lainnya (HarbanganSiagian, 1989).

Sekolah seharusnya memiliki dananya yang mencukupi untuk menyelenggarakan pendidikan. Dana tersebut digunakan oleh sekolah untuk menjalankan proses belajar-mengajar yang berkualitas. Sekolah bertanggung jawab menyediakan dana pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sekolah memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengalokasikan dana guna mencapai tujuan pendidikan mereka. Dalam proses pengumpulan dana, sekolah harus mempertimbangkan berbagai potensi sumber dana, seperti subsidi pemerintah, sumbangan dari masyarakat dan orangtua siswa, hibah, serta sumbangan lainnya. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus dilakukan dengan transparan, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Ini berarti bahwa alokasi dana tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap kebutuhan biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan di sekolah (Redaksi Sinar Grafika, Standar Nasional Pendidikan: PP RINo.19).

Dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan. Pertama, prinsip keikhlasan tercermin dalam sumber dana, khususnya wakaf, yang menunjukkan niat tulus dalam memberikan kontribusi untuk pendidikan. Kedua, prinsip tanggung jawab kepada Tuhan tercermin pada dana yang berasal dari para wali murid, yang mengeluarkan dana sebagai kewajiban mendidik anak-anak mereka, sebagai perintah Tuhan. Ketiga, prinsip suka rela terwujud melalui dana bantuan hibah perorangan yang berasal dari mereka yang mampu dan bersedia berkontribusi untuk kemajuan Islam. Keempat, prinsip halal menekankan bahwa sumber dana pendidikan harus berasal dari dana yang halal dan sah menurut hukum Islam. Kelima, prinsip kecukupan tercermin dalam dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari kas negara untuk memastikan kecukupan dalam mendukung sistem pendidikan. Keenam, prinsip berkelanjutan terwujud melalui dana wakaf yang menetapkan bahwa pokok dana tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada pihak lain, sehingga hasilnya tetap terjaga. Terakhir, prinsip keseimbangan dan proporsional tercermin dalam alokasi dana untuk berbagai kegiatan pendidikan, mencakup pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, gaji guru, beasiswa, dan sebagainya, sehingga tercipta keseimbangan dan proporsi yang tepat (Abuddin Nata, 2010).

Rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh tiga faktor, yaitu penggunaan *educational production function* atau analisis input yang tidak konsisten dalam kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional, penyelenggaraan yang dilakukan secara sentralistik, dan minimnya peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam penyelenggaraan Pendidikan (Muwahid Shulhan, 2013). Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan SDM. Kebijakan tersebut mencakup manajemen mutu berbasis sekolah, di mana sekolah diberi kewenangan untuk merencanakan upaya peningkatan mutu sendiri; pendidikan berbasis partisipasi komunitas, yang melibatkan interaksi antara sekolah dan masyarakat untuk memudahkan berbagai aspek pendidikan; serta paradigma belajar yang menjadikan pelajar sebagai manusia yang diberdayakan. Realisasi kebijakan ini memerlukan manajemen peningkatan mutu (MPM), suatu model yang dikembangkan di berbagai negara, seperti di *Sydney, Australia*, yang mencakup *School Review, Quality Assurance, dan Quality Control*, serta model dari *Pittsburgh, Amerika Serikat*, yang dikembangkan oleh *Donald Adams*, dan model peningkatan mutu sekolah dasar oleh Sukamto dari IKIP Yogyakarta (Hand out pelatihan calon kepala sekolah, Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama, 2000).

Semua upaya peningkatan mutu sekolah akan menjadi kurang efektif dan efisien tanpa dukungan dana yang memadai, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu adalah suatu pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan organisasi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan berkelanjutan dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Tujuan manajemen mutu adalah meningkatkan kualitas pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan efisiensi melalui peningkatan kinerja, sehingga menghasilkan produk yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks manajemen produksi, terdapat mekanisme penjaminan kualitas agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu. Pengendalian mutu harus dilakukan sejak awal perencanaan untuk mengurangi risiko terjadinya produk yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama manajemen mutu bukan hanya memastikan produk memenuhi standar mutu, tetapi juga mengarah pada bagaimana proses produksi dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan.

Pendidikan bermutu dan berkualitas dianggap sebagai harapan utama masyarakat. Setiap lembaga pendidikan, sebagai penyedia jasa, memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan layanan pendidikan yang memuaskan para pelanggan, baik internal maupun eksternal. Kualitas lembaga pendidikan diukur dari sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar mutu, melibatkan guru, karyawan, peserta didik, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Pentingnya kerjasama dengan semua komponen sekolah, termasuk pendidik, karyawan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, menjadi prioritas untuk melaksanakan manajemen mutu pendidikan secara efektif. Upaya meningkatkan mutu pendidikan telah menjadi fokus di berbagai negara sebagai respons terhadap tuntutan global (Mohammad Ali, 2007). Salah satu bentuk inovasi dalam bidang pendidikan adalah memberikan wewenang penuh kepada madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan konteks lingkungannya. Selain pemberian wewenang yang signifikan tersebut, pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga menimbulkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya kepada madrasah terkait. MBS menekankan partisipasi aktif dari berbagai pihak, sehingga melibatkan seluruh komponen pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi komitmen mereka terhadap penyelenggaraan pendidikan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan sekolah secara efektif.

Keberhasilan manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diukur melalui tingkat kepuasan pelanggan. Suksesnya sebuah sekolah dapat diartikan sebagai kemampuannya memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Aspek keberhasilan manajemen sekolah mencakup kepuasan siswa terhadap pembelajaran, perlakuan dari guru dan pimpinan, serta fasilitas yang disediakan. Orang tua siswa juga diharapkan merasa puas dengan layanan terhadap anak-anak mereka, termasuk laporan perkembangan belajar. Pihak pemakai lulusan, guru, dan karyawan juga menjadi penilai keberhasilan melalui kualitas lulusan, kepuasan terhadap layanan sekolah, serta kepuasan terhadap hubungan dan komunikasi di antara staf sekolah. Dalam konteks desentralisasi pendidikan sebagai dampak dari otonomi daerah, upaya standarisasi mutu dan jaminan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar mutu menjadi sangat penting. Desentralisasi membawa konsekuensi variasi lulusan yang tidak terhindarkan karena budaya dan potensi daerah yang beragam. Oleh karena itu, penilaian terus-menerus terhadap kelayakan dan kinerja sekolah menjadi kunci untuk memastikan mutu pendidikan yang optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen mutu sekolah, yang bertujuan utama mencegah dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses produksi Pendidikan (E. Mulyasa, 2004).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran manajemen mutu sangat krusial dalam menjamin pelaksanaan standarisasi mutu dan kualitas pendidikan. Manajemen mutu tidak hanya berfokus pada upaya agar produk pendidikan memenuhi standar mutu, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana proses produksi dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur, sehingga menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan, terutama masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Pentingnya manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diukur melalui tingkat kepuasan

pelanggan, di mana keberhasilan sebuah sekolah dapat diartikan dari kemampuannya memberikan layanan sesuai dengan harapan "pelanggan pendidikan." Dalam konteks pembiayaan pendidikan di Indonesia, kesimpulan dapat diambil bahwa kebijakan pendidikan selalu terkait dengan kepentingan publik, pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dan keuangan pendidikan melibatkan usaha pengumpulan serta penggunaan modal untuk mendukung kegiatan pendidikan. Biaya pendidikan dibagi menjadi Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

DAFTAR REFERENSI

- ,2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- . 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- ,2004. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abuddin Nata,2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Basyiroh, I., Ramdani, C., & Husni, J. (2024). Manajemen Kelembagaan Di RA Hidayatul Islamiyah Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 50-56.
- Dedi Supriadi, 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas
- Depdiknas.2006. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS* Buku. Jakarta: Depdiknas,
- E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fardiana, A., Anwar, R. H. K., Miftahudin, U., Sugandi, M., Jamil, Z. L., & Saefumillah, S. (2024). Manajemen Madrasah Di Yayasan Anwariyah Sukajaga. *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)*, 2(1), 1-10.
- Harbangan Siagian,1989. *Administrasi Pendidikan*, Semarang : Satya Wacana. Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan
- Miftahudin, U., Erihadiana, M., Jahari, J., & Syaf, S. (2023). ANALISIS SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT) DAARUSSALAAM SUKABUMI. *Expectation: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 16-26.
- Nanang Fattah,2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*,Bandung:PT Remaja Rosdakarya-----
-----,2004. *Landasan manajemen pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur Aedi, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama.
- Parida, D., AS, E. E., Satriah, L., & Miftahudin, U. (2024). Penerapan Konseling Individu Dengan Komunikasi Terapeutik Islami Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 105-112.
- Patimah, T. S., Herliani, H., & Sugandi, M. (2024). MANAJEMEN KURIKULUM DI MADRASAH ALIYAH (PENELITIAN DI MA YPPA CIPULUS). *Expectation: Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 13-24.
- Ramayulis, 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Redaksi Sinar Grafika, 2005. *Standar Nasional Pendidikan: PPRI No.19 Tahun 2005*, Jakarta: Sinar Grafika.M
- Sri Winarsih Hand out, 2000. *pelatihan calon kepala sekolah*,Direktorat Sekolah Lanjutan

pertama

- Sugandi, M., Miftahudin, U., & Yanuar, A. T. (2023). SUKSESI KEPEMIMPINAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MIFTAHULHUDA AL-MUSR'CIANJUR, JAWA BARAT). *Cipulus Edu: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 28-41.
- Syaiful Sagala, 2009. *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*, Bandung: CV Alfabeta.
- Teras. Mohammad Ali, 2007. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- UU No.48 tahun 2008 *Tentang pendanaan Pendidikan*.
- uwahid Shulhan dan Soim, 2013. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, Yogyakarta:
- Wati, E. S., Zaman, B., & Ramdani, C. (2024). Parents' Perception of Their Role in Character Education for Early Childhood in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 8(2), 225-234.
- Wawancara, Data MTs Sains Qurani Azzakiyyah